

Arah Dan Kecendrungan Administrasi Publik Di Bali

Anak Agung Gede Oka Wisnumurti
Magister Administrasi Publik Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
okawisnumurti@gmail.com

Abstrak

Membicarakan arah dan kecendrungan administrasi publik di Bali, tentu tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan administrasi publik di Indonesia dan trend perkembangan ilmu administrasi publik global yang sangat tinggi. Munculnya begitu banyak orientasi dan paradigma ilmu administrasi publik menunjukkan betapa ilmu administrasi publik berkembang pesat searah dengan perkembangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan karakteristik ilmu administrasi di Bali dapat dilihat bagaimana ilmu administrasi publik dapat merespon globalisasi yang merampah melalui kegiatan kepariwisataan. Bahwa globalisasi telah merubah kebiasaan masyarakat dan memberikan kemudahan akses bagi seluruh aktor dalam mengakses informasi termasuk informasi tentang kinerja pemerintah. Dengan demikian, arah dan kecendrungan administrasi publik di Bali, mengacu pada konsep dan teori administrasi publik yang bersifat hibrid-interdisipliner, dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang dalam.

Keywords: Administrasi Publik; Bali

PENDAHULUAN

Membicarakan arah dan kecendrungan administrasi publik di Bali, tentu tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan administrasi publik di Indonesia dan trend perkembangan ilmu administrasi publik global yang sangat tinggi. Munculnya begitu banyak orientasi dan paradigma ilmu administrasi publik menunjukkan betapa ilmu administrasi publik berkembang pesat searah dengan perkembangan masyarakat.

Dalam sejarah perkembangan administrasi publik menunjukkan terjadi pergeseran paradigma yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap locus dan focus (Henry, 1992). Pergeseran locus menyangkut dimana administrasi publik itu beroperasi. Apakah pada manajemen pemerintahan, lembaga pemerintahan sehingga menempatkan birokrasi yang dikembangkan oleh Weber menjadi konsep yang penting dalam ilmu administrasi publik. Ataupun dikembangkan sebagai studi kebijakan, governance, dan/atau kepublikan (Dwiyanto, 2018). Sedangkan focus menyangkut objek sasaran yang hendak dimaksimalkan dalam menjawab persoalan dan kepentingan publik. Pertanyaan ini sangat relevan dengan pergeseran paradigma administrasi publik dari Old Public Administration, New Public Administration, New Public Management dan New Public Service dengan menempatkan orientasi pada prinsip-prinsip inovasi (Batalli, 2011). Prinsip ini salah satunya dengan mempertimbangkan karakteristik dalam penerapan nilai (Sururi, 2012). Begitupun terhadap kecendrungan perubahan kebutuhan dan kepentingan publik yang awalnya ada pada ranah birokrasi pemerintahan, kini menjadi wilayah organisasi privat dan asosiasi sukarela, begitupun sebaliknya birokrasi pemerintah menyelenggarakan kegiatan yang dulunya diusahakan oleh organisasi bisnis atau masyarakat sipil, melakukan modifikasi berubah bentuk menjadi hibrid (Dwiyanto, 2018). Kecendrungan perubahan fenomena publik seperti globalisasi, lokalitas, glocalisasi, demokratisasi, privatisasi yang perlu mendapat sentuhan dari konsep dan teori administrasi publik yang bercirikan hibrid-interdisipliner.

Oleh karena itu, diskursus tentang arah dan kecendrungan administrasi publik sudah seharusnya terus diupayakan oleh para ilmuwan, intelektual dan penggiat administrasi publik, sehingga teks administrasi publik tidak kehilangan konteksnya, dan tidak semakin kehilangan relevansinya dengan dinamika yang terjadi pada lingkungannya, baik dalam konteks ke-Indonesiaan maupun lokal (Bali).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah dan Kecendrungan Administrasi Publik di Indonesia

Dwiyanto (2018) dalam bukunya Ilmu Administrasi Publik di Indonesia, mengurai sangat jelas dan lugas tentang keberadaan ilmu administrasi publik di Indonesia yang sedang mencari “identitas”, melalui state of the art dengan beberapa isu, antara lain focus dan orientasi, perdebatan tentang monodisiplin vs multidisiplin, dan nomenklatur yang dipergunakan. Sebagai pijakan untuk menganalisis posisi masing-masing perguruan tinggi dalam perdebatan akademik keilmuan administrasi publik. Lebih lanjut disebutkan bahwa ketiga aspek di atas dapat dijadikan kerangka berpikir untuk memetakan posisi perguruan tinggi dalam perdebatan tentang orientasi dan fokus studi administrasi publik, latar belakang dan rasionalitasnya, dan jati diri serta arah perkembangan kedepan. Begitupun sebaliknya, dapat digunakan sebagai untuk membaca dan mengkritik perkembangan studi administrasi publik di Indonesia (Dwiyanto,2018:91).

Berkenaan dengan focus dan orientasi, dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan, yang awalnya sebagai ilmu ketatausahaan negara, berkembang menjadi ilmu administrasi pemerintahan, bahkan Fisipol UGM telah merintis menjadi studi kebijakan dan manajemen publik menjadi fokus dalam studi kebijakan. Sebagian yang lain masih loyal pada administrasi negara. Tidak terelakan perbedaan latar belakang keilmuan para pendiri dan latarbelakang komunitas akademik kerap mewarnai arah pengembangan ilmu administrasi publik. Perbedaan visi keilmuan dan fokus dalam pengembangan ilmu administrasi publik menjadi keniscayaan yang tidak terhindarkan.

Namun demikian, ada kecendrungan yang sama dalam memahami administrasi publik, bahwa; semakin banyak perguruan tinggi di Indonesia yang menempatkan urusan dan kepentingan publik sebagai lokus dan fenomena yang penting. Urusan dan kepentingan publik menjadi alasan kehadiran studi administrasi publik. Apabila kecendrungan ini semakin meluas dan berkembang maka perkembangan administrasi publik di Indonesia akan mencapai “milestone” baru, sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain, menjadi “beyond government institutions”. (Dwiyanto, 2018).

Diskursus tentang apakah administrasi publik bersifat monodisiplin atau multidisiplin, sampai saat ini masih menjadi diskusi yang menarik. Masing-masing memiliki dasar argumen untuk memberikan penjelasan rasional, bersandar pada dasar dan latarbelakang keilmuan yang tidak terlepas pada paradigma perkembangan ilmu administrasi publik. Di negara-negara Eropa seperti Belanda, Prnaxis, Jerman dan Belgia ilmu administrasi berkembang dan menepatkan administrasi publik sebagai bagian dari administrasi. Sedangkan di negara-negara Amerika Serikat, Inggris dan negara persemakmuran umumnya memberlakukan ilmu administrasi publik sebagai studi yang berdiri sendiri. Tampaknya, tradisi ini ini turut mewarnai cara pandang akademisi di Indonesia dalam menempatkan nomenklatur apakah administrasi publik itu di bawah Ilmu Administrasi atau dibawah fakultas/jurusan administrasi, ataukah di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Realita ini tidak lantas menyurutkan kita untuk berhenti pada perdebatan tentang “wadah” yang sudah ada, namun perlu terus diupayakan untuk mengembangkan ilmu administrasi publik dari “isi”nya, sehingga diskursus akademik mengenai ilmu administrasi publik semakin mendekatkan pada upaya menjawab fenomena dan kepentingan publik yang terus berkembang.

Arah dan Kecendrungan Administrasi Publik di Bali

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Arah dan kecendrungan administrasi publik di Bali tidak terlepas dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki dan tradisi yang terbangun dari asal perguruan tinggi yang notabena berafiliasi pada perguruan tinggi di Jawa,. Sehingga dari sisi “wadah” ada yang bernaung pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di UNUD, Warmadewa, Ngurah Rai, Undiknas, Mahendradata, Panji Sakti, Stipol Wirabakti, dan yang lainnya, ataupun ada yang di bawah Ilmu Administrasi seperti STIA. Merubah dan/atau menyesuaikan

nomenklatur untuk keseragaman “wadah”, tentu sangat menyulitkan secara administratif. Akan tetapi, menyesuaikan isi menjadi keharusan sehingga teks tentang konsep, teori, pendekatan dan metodologi ilmu administrasi publik menjadi relevan untuk menjawab persoalan dan kepentingan publik.

Kepentingan dan persoalan publik antara negara yang satu dengan negara yang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain tentu sangat berbeda. Hal ini sangat tergantung dan ditentukan oleh latar belakang ideologi, politik, sosial, letak geografis, adat, dan budaya serta lingkungan masyarakatnya. F.W. Riggs dalam teori prismaiknya menjelaskan bagaimana faktor lingkungan dan budaya sangat mempengaruhi praktik administrasi publik. Ekologi administrasi sebagai dasar dalam melakukan perbandingan administrasi publik, sangat menentukan arah dan kecenderungan dinamika administrasi publik di suatu daerah. “Dinamika” secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *dynamic* yang berarti ‘dinamis atau bergerak, tidak pasif atau diam, berproses’. Dinamika juga mengandung arti ‘perubahan, suatu proses dan suatu gerakan’.

Dalam konteks sosial budaya dinamika mengandung makna ‘perubahan dan keberlanjutan’ (*change and continuity*) (Ardika, 2005:18), di samping sebagai proses jalinan perubahan yang bersifat *continuity* atau *incontinuity* (Agung, 2006a:2). Dinamika merupakan proses perubahan atau bergerak dalam perubahan, kemudian menciptakan hasil akhir berupa perkembangan masyarakat (Sztompka, 2005:1). Setiap perubahan dialami oleh subjek tertentu dalam perjalanan waktu, tempat dalam ruang, serta modifikasi kuantitatif atau kualitatif (Sorokin dalam Sztompka, 2005:6).

Dinamika merupakan modifikasi dan transformasi pengorganisasian masyarakat, yakni mengacu pada variasi hubungan antarindividu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Transformasi sendiri mengandung arti perubahan rupa, bentuk, fungsi, sifat, dan keadaan ke arah perbaikan sebagai prasyarat bagi perkembangan institusi atau masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:959). Dalam hal ini ada dua kecenderungan intelektual yang ditekankan pada dinamika kehidupan sosial, budaya, dan politik yang menonjol, seperti:

1. Penekanan pada dinamis realitas sosial yang dapat menyebar ke segala arah, yakni membayangkan masyarakat dalam keadaan bergerak (berproses); dan (2) tidak memperlakukan masyarakat (kelompok, organisasi) sebagai sebuah objek dalam arti menyangkal konkretisasi (*concretization*) realitas sosial” (Sztompka, 2005:8-9). Sztompka (meminjam istilah Whitehead) menyebutkan bahwa “perubahan menjadi sifat sesuatu” sehingga sangat penting dan bermanfaat untuk dikaji dan dipelajari. Perspektif diakroni Toybee (Sztompka, 2005:9) menyebutkan bahwa “mempelajari kehidupan manusia pada saat tertentu jelas lebih bermanfaat karena lebih realistis dari pada mempelajarinya dengan membayangkan dalam keadaan diam”.
2. Dinamika menggambarkan realitas sosial sebagai jaringan sosial yang mengikat orang dalam kehidupan bersama. Jaringan sosial terus berubah, mengembang dan mengerut (misalnya ketika individu bergabung atau meninggalkannya), menguat dan melemah (ketika kualitas hubungan mereka berubah), bersatu dan terpecah-pecah (misalnya ketika kepemimpinan muncul atau bubar), serta pemisahan dari unsur lain. Dinamika merupakan suatu proses terus menerus, proses “strukturasi” dari struktur yang mantap di samping merupakan “lambang” yang berfluktuasi daripada pola yang kaku.
3. Dinamika dalam konteks ini adalah proses transformasi yang dinamis dari realitas sosial yang menyebar sehingga menimbulkan perubahan struktural dan kultur masyarakat di samping memberikan pemahaman dan pemaknaan baru bagi kehidupan masyarakat sebagai suatu “kebudayaan”. Dinamika terjadi bukan dalam ruang yang hampa. Medan perubahan ada pada masyarakat sebagai pengelompokan sosial. Masyarakat sebagai arena perubahan akan selalu bergerak dinamis sejalan dengan perkembangannya.

Bali sebagai suatu Daerah sangat dikenal di dunia sebagai daerah pariwisata dan bahkan dinobatkan sebagai destinasi wisata nomor satu di Dunia. Berkembangnya pariwisata Bali,

merupakan anugrah Tuhan, karena Pulau Bali diberikan kelebihan atas keindahan alam, lingkungan yang dihuni oleh manusia Bali yang memiliki budaya adiluhung. Kekayaan alam dan lingkungan telah memberikan isirasi bagi masyarakat Bali untuk beraktifitas, berkeaktifitas, berinovasi yang melahirkan kebudayaan yang adiluhung. Pengombangan konsep tri hita karena sebagai bentuk keseimbangan harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia serta manusia dengan alam menjadi dasar filosofi dalam menjaga keseimbangan. Pendekatan keseimbangan inilah kemudian melahirkan tatakelela yang diwujudkan dalam bentuk sutata parahyangan, sutata pawongan dan su tata palemahan. Bentuk-bentuk pengorganisasi seperti dadia, subak, desa pakraman menjadi wadah untuk beraktifitas, berkeaktifitas dan berinovasi bagi masyarakat Bali dalam mewadahi persoalan dan kepentingan publik. Dadia, Subak dan desa pakraman sebagai bentuk pengorganisasian dibangun atas dasar semangat kebersamaan dan persamaan profesi di satu sisi dan dibingkai dalam kebinekaan dengan mengusung konsep desa (tempat), kala (waktu) dan patra (keadaan) yang melahirkan otonomi.

Ekspresi dalam menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia dan dengan alam diwujudkan melalui yadnya sebagai persembahan suci (yadnya), yang dekemas dengan kreativitas dan inovasi sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan. Sikap religius, toleransi, menghargai dan menghormati orang lain (tatwam asi) sebagai bentuk pelayanan, dan menghargai lingkungan alam menjadi tradisi, adat dan budaya masyarakat (living culture).

Keunikan tradisi, adat dan budaya dengan didukung keindahan alamnya Bali menjadi objek wisata nomor daerah pariwisata di Dunia. Pariwisata dengan tradisi besarnya mengharuskan masyarakat Bali beradaptasi dengan masyarakat dunia. Globalisasi bagi Bali tidak dapat dihindari. Bali ada dalam pusaran glocalisasi, yakni bertemunya globalisasi dengan tradisi masyarakat lokal.

Berbagai persoalan kerap muncul, seperti; bagaimana masyarakat Bali mampu menjaga tradisi, adat, budaya dan lingkungannya agar tetap ajeg dan lestari sebagai aset sebagai bentuk kepentingan publik, serta pariwisata dapat tumbuh berkembang sebagai sumber kesejahteraan sebagai bentuk persoalan publik, oleh karena pariwisata telah menggerus lahan pertanian, membutuhkan fasilitas publik.

Maka, administrasi publik harus mampu menjawab persoalan dan kepentingan publik Bali sebagai daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi, adat dan budaya serta alam lingkungan yang eksotik di satu sisi, dan persoalan dan kepentingan publik kepariwisataan sebagai ciri globalisasi. Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru lagi. Efeknya pun sudah dapat dilihat diberbagai aspek kehidupan. Dalam administrasi publik, globalisasi telah memfasilitasi koneksi dan koordinasi antara masyarakat, pemerintah, NGO. Globalisasi membawa perubahan pada; pertama, adanya penguatan organisasi supranation seperti IMF, World Bank, WTO yang keputusan dan kode etiknya mengikat sistem administratif dari negara-negara lain. Kedua, adanya peningkatan interdependensi antara negara modern dalam mengurus beberapa permasalahan di dalam negerinya. Ketiga, negara menerima keuntungan karena adanya kemudahan dalam memproses informasi.

Lebih jauh, globalisasi memudahkan transfer kultur antar negara terjadi, terlebih dengan kemajuan teknologi saat ini. Teknologi informasi telah merubah batas-batas negara,. masyarakat dengan mudah membandingkan kualitas kinerja pemerintah dengan pemerintah dari negara lain, yang mengakibatkan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah pun menjadi lebih tinggi. Dan saat ini, pemerintah juga dituntut untuk dapat beradaptasi dengan teknologi sehingga dalam melakukan pelayanan, dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih pada transparansi, efisiensi dan efektifitas.

Dwiyanto (2018), telah memberikan guidance tentang bagaimana pengembangan ilmu administrasi publik. Ilmuwan dan universitas dipersilahkan untuk melakukan diskursus mengenai perkembangan administrasi publik yang sesuai dengan “keadaan” mereka. Diskursus tersebut seperti tentang fokus dan orientasi dari ilmu administrasi publik, tentang monodisiplin atau interdisiplin, atau tentang nomenklatur nya. Riset sederhana dapat dilakukan menggunakan isu-isu

tersebut. Seperti FISIPOL UGM yang merubah fokus ilmu administrasi publik menjadi studi kebijakan dan manajemen. Perbedaan latar belakang keilmuan dari para pendirinya dapat memberikan perubahan tersendiri terhadap fokus ilmu administrasi publik pada masing-masing universitas. Seperti penggiat administrasi publik di Fisipol UGM berlatar pendidikan ilmu sosial berbeda dengan penggiat administrasi publik di UI yang berlatar belakang pendidikan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, disimpulkan penting bagi para ilmuan di tiap-tiap universitas yang memiliki program studi ilmu administrasi publik untuk dapat melakukan kajian serta diskursus tentang orientas, fokus, hingga nomenklatur yang sesuai dengan karakteristik dari universitas, ilmuwan sesuai tuntutan pada daerahnya. Masyarakat seperti Tri hita karena (keseimbangan dan harmonisasi), yadnya (pengorbanan suci), tatwam asi (penghargaan, pelayanan), desa, kala patra (otonomi), inovasi, kolaborasi. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan focus dan orientasi administrasi publik pada manajemen dan kebijakan publik dan manajemen pemerintahan darah dan paradigma mutakhir administrasi publik yakni NPS.

Daftar Pustaka

- Ardika, I, W. (2005). Kearifan Lokal dan Ketahanan Budaya Bali, dalam Kompetensi Budaya dalam Globalisasi”, Darma Putra dan Windhu Sancaya (ed.), Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Pustaka Larasan.
- Batalli, M. (2011). Impact of Public Administration Innovations on Enchancing the Citizens, Expectation. *International Journal of e-Education, e-Bussines, e-Manajemen and e-learning*. 1 (2)
- Dwiyanto, A. (2018). *Ilmu Administrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Henry, N. (1992). *Public Administration and Public Affairs, 3th Ed*. Englewood Cliffs: Prentice Hill.
- Putra, A. A, G, A. (2006). *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suruci, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Spirit Publik*. 12 (2)
- Sztompka, P. (2005). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Penanda.